



EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TINJAUAN DARI ASPEK KEBIJAKAN DAN ANGGARAN (Studi Kasus Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)

Mardianto • Henny Aprianty • Rahiman Dani

***Abstract :** This study aims to analyze the evaluation of the implementation of BLT-DD in Padang Binjai Village, Tetap District, Kaur Regency, reviewed from the policy and budget aspects. To analyze the factors that influence the implementation of the BLT-DD Program in Padang Binjai Village, Tetap District, Kaur Regency. To answer these problems, researchers use qualitative research methods. The results of the study indicate that in the context evaluation process, the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) service has been completely good. Based on the results of the study Evaluation of the Sustainability of the Direct Cash Assistance Program in Poverty Alleviation Efforts, a Review of Policy and Budget Aspects, an evaluation was carried out using the CIPP model evaluation which includes context evaluation, Inpt evaluation, Process evaluation, product evaluation: 1. Context Evaluation: BLT-DD services have met the criteria even though some who received this assistance were assisted by their relatives who work at the village office. 2. Input Evaluation: all residents in Padang Binjai Village who received BLT-DD have used the assistance well according to their needs. 3. Process Evaluation: Not all recipients of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) are from lower-income families, but they take advantage of their relatives who work at the Village Office to gain access to assistance. 4. Product Evaluation: In the future, village officials will be more transparent regarding data on BLT-DD recipients and who is eligible to receive it to avoid social jealousy among those who do not receive it.*

Keywords: *Evaluation, Program, Direct Cash Assistance.*

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Konstitusi negara menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

Henny Aprianty (✉)

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email : henny@unihaz.ac.id



yang menyatakan bahwa kondisi material menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan individu. Apabila kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, maka aspek-aspek kehidupan lainnya juga akan berjalan secara optimal. Menurut (Anhar et al., 2023) Dalam upaya menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Sosial melaksanakan program Bantuan Sosial Tunai, yang ditujukan untuk masyarakat miskin guna menjaga daya beli mereka.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, pemerintah juga mengembangkan sistem Jaring Pengaman Sosial (JPS) (Lestari, 2021). Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Setiawan et al., 2022). Dalam peraturan tersebut, salah satu kebijakan yang diatur adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Secara khusus, Pasal 1 ayat 28 menjelaskan bahwa BLT Dana Desa merupakan bantuan finansial yang dialokasikan kepada warga miskin yang dananya berasal dari alokasi dana desa.

Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan ini, khususnya dalam Pasal 1 ayat 20, menetapkan kriteria penerima bantuan tunai dari Dana Desa Tahun 2022, yang ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- a. Keluarga yang menetap di desa setempat dan hidup dalam kondisi serba kekurangan atau tidak memiliki penghasilan tetap.
- b. Keluarga miskin yang belum tercatat sebagai penerima bantuan dari program pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, maupun Kartu Prakerja.
- c. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit menahun atau kronis.

Mengacu pada kriteria calon penerima manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya keluarga yang dinilai tergolong miskin atau tidak memiliki kemampuan ekonomi yang layak yang berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk BLT-Dana Desa (Sasuwick et al., 2021). Oleh karena itu, perlu dipahami lebih lanjut kategori-kategori yang termasuk dalam kelompok keluarga miskin atau kurang mampu. Klasifikasi ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2023, sebagai acuan resmi dalam menentukan pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.

1. Tidak memiliki pendapatan tetap, atau memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Sebagian besar belanja rumah tangga digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan pokok yang bersifat mendesak.
3. Kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan, kecuali pada fasilitas yang memperoleh dukungan subsidi dari pemerintah seperti Puskesmas.
4. Tidak sanggup membeli pakaian baru untuk anggota keluarganya setidaknya sekali dalam satu tahun.
5. Hanya mampu menyekolahkan anak-anak hingga tingkat SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga.





6. Tempat tinggal memiliki dinding dari bahan seadanya seperti bambu, kayu, atau batu yang kondisinya rusak atau belum dilapisi dengan semen.
7. Lantai rumah terbuat dari material seperti tanah, kayu, atau keramik yang sudah rusak atau bermutu rendah.
8. Atap rumah menggunakan bahan seperti ijuk, daun rumbia, genteng, seng, atau asbes dalam kondisi tidak layak atau rusak.
9. Sumber penerangan bukan berasal dari jaringan listrik resmi, atau menggunakan listrik tanpa meteran.
10. Ruang hidup sangat sempit, dengan luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi untuk setiap penghuni.
11. Akses air bersih hanya berasal dari sumber yang tidak terlindungi, seperti sumur terbuka, air hujan, sungai, atau mata air yang belum memenuhi standar kesehatan.

Peneliti memulai studi ini dengan melakukan observasi awal di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Observasi dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah warga dan Kepala Desa. Dari pengamatan tersebut, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidupnya sebagai petani dan umumnya menerima bantuan dari pemerintah secara merata. Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa persoalan dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (Triyanto et al., 2022). Salah seorang warga mengungkapkan bahwa terdapat individu yang tidak memenuhi persyaratan namun tetap menerima bantuan, sedangkan sebagian warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Hal ini diduga disebabkan oleh ketidakakuratan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan oleh pihak terkait.

Menurut (Yul Dewi Marta & Nurlitasari, 2021) Penyaluran BLT Dana Desa juga mengalami berbagai kendala, terutama terkait ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana, yang dipengaruhi oleh lambatnya proses transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, menurut pernyataan Kepala Desa Padang Binjai, terdapat masyarakat yang mengajukan protes terhadap pelaksanaan program ini karena merasa layak menerima bantuan, padahal secara kondisi ekonomi mereka dinilai lebih baik dibandingkan dengan warga lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, diketahui bahwa Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat berjumlah Rp630.000.000. Dari total dana tersebut, sebesar 40% dialokasikan untuk program BLT. Bantuan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu ditetapkan sebesar Rp600.000 per keluarga untuk tiga bulan pertama, dan kemudian dilanjutkan sebesar Rp300.000 per bulan pada periode berikutnya. Bantuan ini dibebaskan dari pungutan pajak, sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman BLT Dana Desa Tahun 2023. Di Desa Padang Binjai sendiri, yang memiliki total 171 Kepala Keluarga, hanya 48 keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat, meskipun banyak masyarakat lain yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut.

Situasi ini menimbulkan potensi ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi warga yang membutuhkan namun tidak terakomodasi dalam daftar penerima. Ketidakmerataan bantuan juga dikhawatirkan dapat memicu konflik antarwarga. Padahal, tujuan utama program Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan





ekonomi, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak (Pradani et al., 2021).

LANDASAN TEORI

Evaluasi pada dasarnya merupakan proses analisis terhadap jalannya pelaksanaan suatu program, dengan tujuan untuk memproyeksikan, menghitung, serta memantau pelaksanaannya di masa mendatang agar dapat berjalan secara lebih efektif. Oleh sebab itu, fokus utama dari evaluasi bukanlah pada kekeliruan masa lalu, melainkan pada potensi perbaikan di masa depan demi meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai dan mengukur secara objektif sejauh mana hasil yang telah direncanakan dapat dicapai. Hasil dari proses evaluasi ini dimaksudkan sebagai masukan yang bermanfaat dalam proses perencanaan program berikutnya (Joshua, 2017).

Istilah evaluasi memiliki makna yang saling terkait dan mengacu pada penggunaan berbagai indikator nilai untuk mengukur keluaran dari program atau kebijakan. Secara umum, kata "evaluasi" sering dianggap sepadan dengan istilah penilaian atau estimasi, yang semuanya mencerminkan aktivitas peninjauan hasil kebijakan dalam kerangka nilai tertentu. Dalam konteks yang lebih mendalam, evaluasi bertujuan memberikan informasi terkait sejauh mana suatu hasil kebijakan memiliki nilai atau manfaat. Ketika sebuah kebijakan memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan tertentu, maka hasil tersebut dianggap bernilai. Dengan kata lain, kebijakan atau program tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan karena berhasil menjawab atau menyelesaikan masalah kebijakan yang ada (Dunn, 2003).

Secara umum, evaluasi kebijakan merujuk pada rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menilai suatu kebijakan secara menyeluruh, baik dari sisi isi/substansi, proses pelaksanaan, maupun dampaknya (Purnawan et al., 2024). Penilaian kebijakan ini dipahami sebagai aktivitas yang memiliki fungsi penting dan tidak hanya dilakukan setelah kebijakan dijalankan, tetapi juga sepanjang seluruh tahapan siklus kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat mencakup berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan program atau solusi kebijakan, pelaksanaannya, hingga pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Model Evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP)

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Menurutnya, evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menggali, dan menyajikan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar data yang dikumpulkan benar-benar relevan bagi para pengambil kebijakan, maka deskripsi evaluasi harus disusun secara rinci, mencakup unsur spesifikasi, definisi yang jelas, serta penjabaran informasi yang mendalam.

Dalam pandangan (Stufflebeam, 2002), model evaluasi CIPP telah digunakan secara luas di berbagai belahan dunia sebagai alat untuk menilai program dan layanan di berbagai bidang. Penerapannya mencakup sektor perumahan, pengembangan masyarakat, sistem transportasi, hingga instrumen evaluasi dalam institusi militer. Model ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu evaluasi konteks, yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan latar belakang program; evaluasi input, yang menilai strategi, sumber daya, dan perencanaan; evaluasi proses, yang memantau pelaksanaan





kegiatan; serta evaluasi produk, yang mengevaluasi hasil akhir atau dampak dari suatu program.

1. *Penilaian Konteks.* Daniel Stufflebeam menyatakan bahwa penilaian konteks bertujuan untuk menjawab pertanyaan: tindakan apa yang seharusnya diambil. Lewat penilaian ini, kebutuhan yang menjadi dasar untuk menyusun sebuah program
2. *Penilaian Terhadap Umpan Balik.* Proses penilaian masukan bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: langkah apa yang perlu diambil. Dalam evaluasi ini, tantangan, sumber daya, dan kesempatan dikenali untuk mendukung pengambil keputusan dalam menetapkan sasaran, serta prioritas, dan juga untuk memudahkan kelompok pengguna yang lebih luas dalam mengevaluasi sasaran, prioritas, dan keuntungan dari program. Selain itu, penilaian ini juga memperhatikan metode lain, rencana aksi, perencanaan sumber daya manusia, serta anggaran untuk mengevaluasi kelayakan dan kemungkinan penghematan biaya guna mencapai kebutuhan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengambil keputusan memanfaatkan penilaian masukan untuk menentukan pilihan di antara berbagai rencana, menyusun usulan pendanaan, mengatur sumber daya, menempatkan tenaga kerja, merencanakan jadwal pekerjaan, mengevaluasi rencana kegiatan, serta melakukan proses penganggaran.
3. *Proses Penilaian.* Evaluasi proses bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program tersebut sedang berjalan. Dalam konteks ini, evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan rencana yang membantu staf program dalam menjalankan aktivitas, serta mendukung kelompok pengguna yang lebih luas dalam menilai dan memahami manfaat dari program tersebut.
4. *Penilaian Produk.* Evaluasi produk bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apakah ini berhasil? Proses evaluasi ini berupaya mengenali dan menilai hasil serta keuntungan yang diperoleh, baik yang telah direncanakan maupun yang tidak, dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendukung staf dalam mempertahankan fokus mereka dalam mencapai hasil yang signifikan dan, pada akhirnya, untuk memberikan dukungan kepada kelompok pengguna yang lebih besar dalam menilai sejauh mana usaha mereka berhasil dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Sesuai dengan penjelasan Menurut penjelasan dari Wynandin Imawan yang dikutip dalam karya Suparman dan rekan-rekannya (2021), Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Program ini termasuk dalam salah satu dari tiga kategori penanganan kemiskinan, yakni kategori pertama yang dikenal sebagai Program Dukungan dan Perlindungan Sosial. Dalam kategori ini, BLT sejajar dengan berbagai program lainnya, seperti distribusi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (Purnawan et al., 2022). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 28, BLT yang bersumber dari Dana





Desa dijelaskan sebagai bentuk bantuan kepada warga desa yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 angka 13, program ini dijelaskan sebagai pemberian bantuan keuangan dalam bentuk tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah desa.

. Kriteria penerima bantuan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah desa, dengan tujuan untuk membantu pemulihan ekonomi.

Bantuan Tunai Langsung Sumber dana ini diperoleh dari Dana Desa yang disetujui oleh pemerintah daerah dengan batas maksimal sebesar 35%. (Yul Dewi Marta & Nurlitasari, 2021)menerangkan bahwa Dana Desa adalah pengalokasian dana dalam anggaran negara yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dampak COVID-19 pada masyarakat kurang mampu di desa. Berbagai keuntungan dari Dana Desa mencakup penyaluran anggaran yang tercantum dalam anggaran negara, serta potensinya untuk menjadi program aksi cepat yang dapat segera dilaksanakan, serta kemampuannya untuk melengkapi program lainnya guna mengurangi dampak sosial dan ekonomi.

METODOLOGI

Tipe Studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2008) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sosial serta persoalan manusia. Dalam metode ini, peneliti menyelidiki perilaku sosial yang terbentuk berdasarkan interaksi, dengan adanya keterkaitan yang kuat antara peneliti dan objek yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung terhadap fokus kajian, dengan rincian sebagai berikut::

1) Wawancara

(Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa Wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Namun, daftar pertanyaan juga dapat disediakan sebelumnya untuk dijawab pada waktu yang berbeda. Dengan memanfaatkan metode wawancara, seorang peneliti dapat mencatat jawaban dari informan, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengingat respons terhadap pertanyaan yang diajukan.

2) Observasi

Teknik observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan secara langsung di lapangan. Berdasarkan penjelasan (Andi Prastowo, 2012), teknik ini berkaitan dengan Pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti, baik secara langsung maupun melalui cara lain, mengenai objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Dalam studi ini, observasi akan diarahkan pada pengamatan langsung di lapangan untuk menilai efektivitas dari program bantuan langsung tunai.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan Data yang dikumpulkan berupa Catatan, dokumen, serta foto-foto penting yang diambil dari objek yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN





Hasil

Berdasarkan temuan dari kajian mengenai Evaluasi Keberlanjutan Program Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pengentasan kemiskinan, telah dilakukan penilaian melalui pendekatan model CIPP yang mencakup evaluasi konteks, input, proses, dan produk.

1. Evaluasi Konteks : pelayanan BLT-DD sudah memenuhi kriteria walaupun ada sebagian yang mendapatkan bantuan ini dibantu oleh saudara-saudara mereka yang berprofesi di kantor desa.
2. Evaluasi Masukan : semua masyarakat di Desa Padang Binjai yang menerima BLT-DD sudah menggunakan bantuan itu dengan baik sesuai kebutuhannya.
3. Evaluasi Proses : tidak semua Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, yang dikenal sebagai BLT-DD, berada pada tingkat ekonomi yang rendah, namun mereka sering memanfaatkan kerabat yang bekerja di Kantor Desa untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan bantuan.
4. Evaluasi Produk : untuk kedepannya perangkat desa lebih transparan lagi perihal data yang menerima bantuan BLT-DD siapa saja yang berhak menerima BLT-DD ini supaya tidak terjadi kecemburuan sosial dengan masyarakat yang tidak dapat BLT-DD.

Pembahasan

Setelah pelaksanaan wawancara dan pengamatan terhadap informan yang terlibat dalam penelitian, dapat disampaikan bahwa evaluasi Keberlanjutan program bantuan langsung tunai dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam upaya meningkatkan pelayanan pelaksanaan masyarakat penerima bantuan BLT-DD di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, masih belum dapat dikatakan memenuhi unsur Konteks, Input, Proses, dan Produk (CIPP).

1. Evaluasi Konteks

Berdasarkan pendapat Daniel Stufflebeam, tujuan dari penilaian ini adalah untuk menemukan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Dalam menentukan apa yang harus dipersiapkan, satu indikator yang digunakan adalah kebutuhan.

Seluruh perangkat desa, dari Kepala Desa sampai Kepala Dusun, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan Bantuan Langsung Tunai, dengan memberikan prioritas kepada masyarakat yang paling memerlukan. Tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup mendapatkan bantuan Lainnya seperti KHS, PKH, setelah nama-nama nya dicatat langsung mengadakan survey.

Masyarakat penerima BLT-DD sangat merasa pelayanan yang di berikan sudah cukup baik walaupun sebagian bantuan itu kepala dusun yang memberi peluang kepada saudaranya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada satu indikator, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan BLT di Desa Padang Binjai terlaksana dengan baik.

2. Evaluasi Masukan

Evaluasi ini bertujuan untuk Menentukan masalah, sumber daya, dan kesempatan yang akan membantu pengambil keputusan dalam menyusun





tujuan, menetapkan prioritas, serta mendukung berbagai kelompok pengguna dalam mengevaluasi tujuan, prioritas, dan manfaat yang ada BLT-DD ini.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab di desa, seperti Kepala Desa serta Kepala Dusun selalu melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari contohnya dengan membeli beras,minyak,biaya anak sekolah dan kegunaan lainnya walaupun dengan bantuan tersebut belum memenuhi kebutuhan lainnya.

Untuk masyarakat penerima bantuan saat ini sangat Dengan adanya BLT-DD ini, masyarakat akan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti buat Buat makan, kalo untuk Bayar listrik, Sekolah anak walaupun itu belum cukup harus kerja lagi walaupun kerja serabutan yang penting halal supaya bisa biaya sekolah anak dan biaya lainnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti mengenai satu indikator, terungkap bahwa masyarakat memahami cara penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Temuan menunjukkan bagaimana pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai tersebut oleh masyarakat dan adanya bantuan ini masyarakat sangat terbantu.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana yang ada agar dapat mendukung staf program dalam menjalankan aktivitas. Selanjutnya, ini juga mendukung kelompok pengguna yang lebih luas dalam mengevaluasi program dan mengenali keuntungannya.

Setiap masyarakat penerima Bantuan kususny masyarakat penerima BLT-DD,para perangkat desa selalu menseleksi dari segi ekonomi ,pekerjaan agar yang menerima benar benar tepat sasaran atau hanya pemalsuan data tapi ada masyarakat Penerima bantuan langsung tunai BLT tidak semuanya memiliki kondisi ekonomi yang rendah, karena mereka memanfaatkan karyawan dan anggota keluarga yang bekerja di Kantor Desa untuk mendapatkan kesempatan bantuan, yang mengarah pada munculnya kecemburuan sosial.

4. Evaluasi Produk

Evaluasi ini bertujuan untuk mengenali dan menilai hasil serta keuntungan, baik yang sudah direncanakan maupun yang muncul secara tidak terduga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pihak perangkat desa saat belum melakukan pendataan yang baik karena belum adanya transparan data yang Mendapatkan Dana Desa BLT-DD berupa Bantuan Langsung Tunai dan tetap memperhatikan kepentingan keluarga daripada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat sudah bisa memanfaatkan bantuan ini dengan baik dengan adanya bantuan mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan yang bisa menumbuhkan prekonomian mereka menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, temuan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 80%. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis evaluasi berikut:

Evaluasi Konteks, dalam penilaian terhadap konteks Pelaksanaan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menunjukkan adanya dampak yang





positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Sepanjang penelitian, para informan melaporkan bahwa mereka telah mengikuti prosedur dari penerimaan berkas hingga survei ke rumah warga. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa pelayanan BLT-DD telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa pelayanan yang memberikan kesempatan khusus bagi kerabat untuk mengurus bantuan tunai.

Evaluasi Masukan, dalam proses evaluasi masukan terhadap pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bentuk pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka meringankan beban ekonomi rumah tangga yang terdampak kondisi sosial dan ekonomi tertentu kurang mampu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, seperti untuk membeli beras kebutuhan dasar dan memulai usaha kecil.

Evaluasi Proses, dalam penilaian proses terkait ekonomi masyarakat Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Program ini ditujukan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan yang telah kehilangan pekerjaan, tetapi tidak menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Observasi dan wawancara mengungkap bahwa beberapa penerima BLT-DD masih memiliki perekonomian yang tergolong layak, meski mereka memanfaatkan kerabat yang bekerja atau menjadi perangkat di kantor Desa Padang Binjai.

Evaluasi Produk, dalam menilai pencapaian masyarakat Staf desa bertugas memastikan bahwa penerima BLT-DD benar-benar memenuhi syarat melalui memberikan layanan sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial dalam membantu masyarakat kurang mampu. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima BLT-DD merasa terbantu berkat adanya program ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-ruzz Media.
- Anhar, R., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 38–48. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24246>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University Press*. Gadjah Mada University Press. <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Joshua, B. (2017). *MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI*. 3(1), 111.
- Lestari, N. (2021). Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 6(2), 100–116. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v6i2.326>
- Pradani, R. F. E., Sarwani, I., Fikri, A. R., & Firdaus, M. (2021). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Langsung Tunai (BST) Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 121–128. <https://doi.org/10.26740/jupe.v9n3.p121-128>
- Purnawan, H., Suwanto, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). *Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City*. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Sasuwuk, C. H., Lengkon, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Stufflebeam, D. L. (2002). Cipp Evaluation Model Checklist. *Evaluation*, June.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian administrasi*. CV. Alfabeta Bandung.
- Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Yul Dewi Marta, F., & Nurlitasari, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1870>

